

PERAN CENDEKIAWAN BIROKRAT TERHADAP TREN PENUMBUHAN INOVASI SEKTOR PUBLIK DALAM RANGKA MANIFESTASI BELA NEGARA

Satya Aryandaru

(PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, *e-mail*: ryanbagus99@gmail.com)

ABSTRAK

Tulisan ini berupaya menelisik kedalaman akan keterlibatan para intelektual (cendekiawan) birokrat untuk membuka daya persepsi segenap aparatur pemerintah terhadap tumbuhnya inovasi pemerintah diberbagai bidang, sebagai upaya kolektif kebangsaan dalam mendukung persepsi positif program bela negara. Peran para intelektual dalam rangka mencerdaskan bangsa dapat dilihat sejauh mana mekanisme *maintenance* yang dilakukan agar kontinuitas ilmu, pengetahuan, dogma atau bahkan ideologi yang diperoleh oleh aparatur, dapat lekat dan berkelanjutan, serta tidak menjadi sampah dalam bentuk jargon-jargon. Melalui pendekatan kualitatif interpretif dan pengumpulan data dengan metode *desk research* (studi kepustakaan), pada titik inilah eksistensi cendekiawan yang bernaung dibawah bendera institusi publik dipertanyakan, hingga sejauh mana mampu membuka sudut pandangnya untuk berpartisipasi aktif dan murni untuk kemudian menelaah efektivitas implementasi program bela negara sebagai sebuah kebijakan publik yang inovatif. Pada akhirnya, daya intelektualitas cendekiawan birokrat dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk mengkreasi rumusan inovasi yang komprehensif sesuai *roadmap* pertumbuhan berbasis inovasi dari Sistem Inovasi Nasional (Sinan) dan mempengaruhi baik lingkungan strategis birokrasi secara struktur maupun fungsi, maupun masyarakat sebagai komponen penting Negara. Inovasi dengan berbagai dampak positifnya, akan didedikasikan untuk tujuan yang lebih besar seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, efektivitas pemerintahan, pelayanan publik yang lebih bermutu dan kemakmuran bagi seluruh elemen bangsa.

Kata kunci: Cendekiawan Birokrat, Inovasi Sektor Publik, Aksi Bela Negara

ABSTRACT

This paper seeks to explore the depth of the involvement of bureaucrat intellectuals to open the perception of the entire government apparatus to the growth of government innovation in various fields, as a national collective effort in supporting the positive perception of the state defense program. The role of intellectuals in order to educate the nation can be seen to what extent the maintenance mechanism is carried out so that the continuity of science, knowledge, dogma or even ideology obtained by the apparatus, can be sticky and sustainable, and not become junk in the form of jargon. Through interpretive qualitative approaches and data collection using the desk research method, at this point the existence of intellectuals under the banner of public institutions is questioned, to the extent that they are able to open their perspectives to participate actively and purely to examine the effectiveness of implementing state defense programs as an innovative public policy. In the end, intellectual bureaucrats' intellectual power is needed by government agencies to create a comprehensive innovation formula according to the innovation-based growth roadmap of the National Innovation System (Sinan) and influence both the strategic environment of the bureaucracy in structure and function, and the community as an important component of the State. Innovation with its various positive impacts will be dedicated to greater goals such as economic growth, community welfare, government effectiveness, better quality public services and prosperity for all elements of the nation.

Keywords: Bureaucrat Scholars, Public Sector Innovation, State Defense Action



A. PENGANTAR

Era akselerasi menuntut instansi pemerintah (publik) untuk lebih cepat memacu derap langkahnya dalam rangka mengadaptasi diri pada konstelasi masyarakat global. Penumbuhan inovasi adalah keniscayaan. Akan tetapi, Pemerintah, baik pusat maupun daerah, jika hanya berlomba–lomba menggagas inovasi–inovasi demi kepentingan internal tanpa paham tujuan utama yang lebih luas, yakni kepentingan nasional, maka akan berlaku pepatah “tumbuh seribu, mati satu-persatu”. Hal ini diakibatkan seringnya inovasi pemerintah gugur dan tumbang lebih dini sebelum *outcome* tercapai atau keberlanjutannya terhenti.

Di satu sisi, aksi bela negara pada saat ini begitu mengemuka dengan berbagai konsep dan cara. Bela negara jelas muncul demi membela kepentingan negara (nasional), namun progres implementasinya masih abstrak dan pragmatis. Inilah peluang bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai inisiator dan pelaku perubahan untuk mengintegrasikan sudut pandang, bahwa inovasi–inovasi yang telah ada ataupun dilahirkan kelak, baik dalam *scope* kecil maupun besar, harus berorientasi pada tujuan utama, yaitu membela negara dalam konteks kepentingan nasional.

Terkait hal tersebut, ruang kesadaran segenap elemen bangsa akan jargon-jargon semangat ke-Indonesia-an tidak hanya terletak pada jejak lisan dan harapan. Akan tetapi, mengenali bangsa ini secara lebih mendalam untuk kemudian dibela kedaulatannya dinilai lebih arif. Kewajiban segenap elemen bangsa kemudian adalah menyadari bahwa Indonesia adalah suatu negara bangsa. Negara adalah bangsa yang terorganisasi. Bangsa adalah suatu pengelompokan dari orang-orang yang bertekad hidup bersama. Adalah “bangsa” yang sering dikatakan punya “kultur/ budaya nasional” yang mengerti apa-apa yang secara bersama dihayati dalam suatu kelompok. Jadi pengertian “kultur/ budaya nasional” mengandung sejenis kesadaran diri (*self awareness*) (Joesoef, 2014:46-47). Organisme yang sadar berbangsa akan menjadi benteng kokoh ditengah buaian infiltrasi asimetris pengaruh global yang terkandung didalamnya kumpulan nilai destruktif.

Menengok era kini, Indonesia yang telah berproses untuk memijakkan kaki sebagai negara modern, seperti kembali ke dalam “keadaan alami” atau “*state of*



nature” yang tanpa hukum, tanpa aturan dan tanpa kesepakatan, sehingga kehidupan manusia saling mengancam, manusia dilukiskan oleh Thomas Hobbes sebagai serigala dari manusia lainnya (*homo homini lupus*) (Kaelan, 2000:31). Adu ideologi antar organisasi masyarakat dan partai politik, kebanggaan konsumsi bahan pangan dan gawai impor, dominasi bahasa asing dibanding bahasa Indonesia, langgengnya senyum para koruptor, minimnya riset dan teknologi yang dihasilkan bangsa, para pendidik yang bertransformasi menjadi ahli provokasi dan propaganda dalam konteks negatif atas nama pesanan kelompok dan golongan yang menyebarkan virus ujaran kebencian tanpa filter, menjadi contoh faktual aktual. Beragam anomali tatanan ideal kehidupan bernegara tersebut hanya sebagian kecil dari jutaan fakta yang ada. Kesemuanya menjadi persenjataan sosial yang ternyata lebih mematikan daripada persenjataan militeristik karena dampak yang diakibatkan lebih menyebar luas dan mengenai jantung kearifan dan sistem sosial masyarakat.

Dinamisnya kondisi bangsa tersebut memaksa pengelola negara sekarang, untuk mencoba melestarikan kultur kesadaran berbangsa tersebut dengan “menitipkan” Aksi Bela Negara yang diselenggarakan oleh berbagai instansi untuk mewujudkan cita-cita pertahanan rakyat semesta, dengan wujud pendidikan menyeluruh tentang kebangsaan, mulai dari kesamaptaan, mengenali nilai-nilai luhur dan identitas bangsa, hingga pemaknaan terhadap geostrategi global.

Usaha pencerdasan melalui program Bela Negara merupakan tugas pokok yang terus menerus dan bersifat eksklusif dari dunia pendidikan, melalui ragam medium pengejawantahan. Sebab sebelum suatu bangsa dapat secara efektif mengurus nasibnya sendiri, ia harus terlebih dahulu membangun suatu subsistem kehidupan negara, yakni pendidikan, yang mengkhususkan diri dalam “menghasilkan” orang yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan-keputusan kolektif yang mengikat semua dan setiap rakyatnya.

Kegamangan demi kegamangan yang terus menderu membuat posisi dan peran cendekiawan birokrat dalam kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini semakin penting khususnya dalam penguatan wacana tentang Bela Negara yang pada rezim ini makin nyaring bergaung. Pembahasan berikut akan menawarkan sudut pandang



(perspektif) dan kiprah yang seharusnya dilakukan para intelektual birokrat, seperti peneliti, akademisi, widyaiswara, hingga pembuat kebijakan strategis (praktisi) dalam penjelajahan fenomena ilmiah baru dalam mempengaruhi kepekaan setiap aparatur dan instansi sektor publik terhadap tren penumbuhan inovasi, melalui pendidikan, pelatihan dan pengajaran, serta proses teknokrasi dalam dinamika penyusunan kebijakan, terkait efektivitas bela negara, dengan semakin strategisnya posisi Indonesia di tengah pusaran dunia untuk mawas ke dalam terhadap tantangan internal bangsa dan mawas ke luar terhadap dinamika global.

B. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif yang berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti (Neuman, 1997:68). Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif terhadap situasi nasional dengan munculnya tren penumbuhan inovasi dan korelasinya terhadap bela negara mengandung ambiguitas yang besar. Dalam menghimpun data, metode yang digunakan adalah *desk research*, yakni studi kepustakaan yang dilakukan untuk mengembangkan aspek teoritis maupun manfaat praktis, mencari dasar pijakan/ fondasi terkait kedalaman peran penumbuhan inovasi oleh instansi sektor publik yang disinergikan dengan pragmatisme bela negara yang berkembang saat ini.

C. PEMBAHASAN

C.1 Akar Historis dan Konsepsi Bela Negara

Masa lalu bangsa Indonesia merupakan titik tolak yang dapat menunjukkan apakah langkah ke depan yang kita pilih melenceng atau tidak dari cita-cita semula, sebab kelahiran Indonesia memiliki sejarah jiwa kebangsaan unik dan luhur. Dulu, pelibatan pemuda yang memang didorong untuk menguasai masa depan, harus memahami rujukan sejarah tersebut.



Laman sejarah bela negara sebagai sebuah gerakan nasional baru terbuka hampir 3 (tiga) dekade lalu, tepatnya ketika masa pemerintahan Orde Baru. Pada periode ini gaung wujud Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) semakin bergema, dengan melibatkan interaksi masyarakat sipil untuk mengambil langkah bersama militer. Meskipun tidak ada hierarki struktural dibawah militer namun pelibatan sipil merupakan amanat kepedulian terhadap bangsa. Pada era ini, muncul istilah “Satya Negara”, yaitu Gerakan Nasional yang bercorak kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan, berupa pendidikan politik yang menumbuhkembangkan kesadaran, sikap dan perilaku luhur mencapai watak dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang” (Suseno, 1994: 62). Istilah tersebut muncul saat diselenggarakan Simposium Nasional Bela Negara oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa, Lembaga Studi Bela Negara & Dephankam) pada 29 Mei 1991 dan ditindaklanjuti dengan Sarasehan Bela Negara. Dalam forum ini diucapkan Deklarasi Bela Negara yang kemudian ditetapkan Deklarasi Satya Negara oleh DPP KNPI pada 28 Agustus 1993.

Pasca Orde Baru, tepat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terbit Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, yang mendasarkan diri pada sejarah terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948, untuk mengisi kekosongan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka Bela Negara. Ini menjadi dasar diselenggarakannya pendidikan Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan hingga saat ini, dan dalam rangka menjamin penyelenggaraannya dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019, dengan inti amanat yakni meningkatkan kapasitas dan sinergitas kekuatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Kebijakan Pendidikan Bela Negara oleh Kementerian Pertahanan menjadi gerakan nasional yang pada awal penyelenggaraannya mematok target sasaran yakni 100 ribu warga Indonesia menjadi Kader Bela Negara dari semua kalangan, mulai PAUD hingga Perguruan Tinggi, dengan penyesuaian jenjang kurikulum.



Target kurikulum yang sedang dalam tahap perancangan selanjutnya menyoal kepada pejabat kementerian/ lembaga tingkat madya dan utama, agar gerakan nasional Bela Negara juga masuk ke dalam ruang-ruang birokrasi.

C.2 Peperangan Gaya Baru

Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara, merupakan nilai dasar Bela Negara yang sedang ditunggu kiprahnya untuk hadir di tengah publik. Sejak awal gagasan Pendidikan Bela Negara muncul hingga saat ini nampak riuh sebagai kebijakan unggulan, namun dinilai kurang populer. Hanya besar di media massa, universitas-universitas besar dan kantor-kantor pemerintahan.

Yakinkah jika hanya dengan pengucapan nilai-nilai Bela Negara, pembelajaran tentang Wawasan Nusantara, Alur Laut Kepulauan Indonesia, gatra-gatra Ketahanan Nasional, 4 Pilar Kebangsaan, kebersamaan dan kerjasama, kemudian para calon kader Bela Negara meningkat rasa bela negaranya melebihi apapun? Perlu keterbukaan cara pikir baru tentang cara merespon gejala dinamis negatif yang bisa jadi itu merupakan ancaman awal bersifat asimetris (tak biasa/non militeristik) yang jika tidak disikapi dengan mawas, akan menjadi boomerang bagi negeri. Medan pertempuran tidak hanya melewati hutan, gunung dan rawa-rawa, namun permainan pikiran (*mind games*) melalui perang sosial, perang ekonomi dan perang budaya yang mulai merasuk.

Saat ini masyarakat Indonesia telah menjadi pasar. Tanpa disadari, bahkan oleh kaum terpelajar sekalipun, perang budaya telah dimulai, lambat tapi pasti, tanpa deklarasi, tetapi melalui kata-kata yang merayu, dengan citra tipuan bergaya menyesatkan. Jika perang klasik membidik organ hati untuk mematikan dan menguasai, perang ekonomi membidik perut guna mengeksploitasi dan memperkaya diri, perang kultural membidik sekaligus kepala dan jiwa guna melumpuhkan tanpa mematikan, guna menguasai melalui pembusukan dan memperkaya diri melalui pbingungan kebudayaan dan ketidakberdayaan rakyat.

Beberapa fakta ini akan membuka pikiran tentang peperangan gaya baru. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menginformasikan bahwa transaksi dalam jaringan kian diandalkan untuk kepentingan bisnis narkoba dan pendanaan terorisme. Hingga kini, transaksi narkoba yang terungkap menyentuh nilai Rp. 3,6 Triliun. *Game Online* menjadi salah satu sarana transaksi narkoba dalam jaringan. Sementara para teroris menyebarkan propaganda dan mengakumulasi modal lewat *crowd funding* di media sosial. Belum lagi kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). berdasarkan Indeks Persepsi Publik Indonesia Antipencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APUPPT) 2017 menyebutkan, pelaku TPPU berasal dari kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif dan pengurus partai politik (Kompas, 20 Desember 2017). Fakta yang sangat mencengangkan yang tanpa kita sadari hal demikian telah masif terjadi. Belum lagi persoalan lain seperti disparitas kesejahteraan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, rendahnya literasi masyarakat, kemandirian dan ketahanan pangan, dan lain sebagainya, menjadi alarm bagi kita sebagai bagian dari komunitas intelektual untuk meningkatkan kewaspadaan lebih, dengan cara tidak berlebihan, menjernihkan bukan memperkeruh keadaan yang ada.

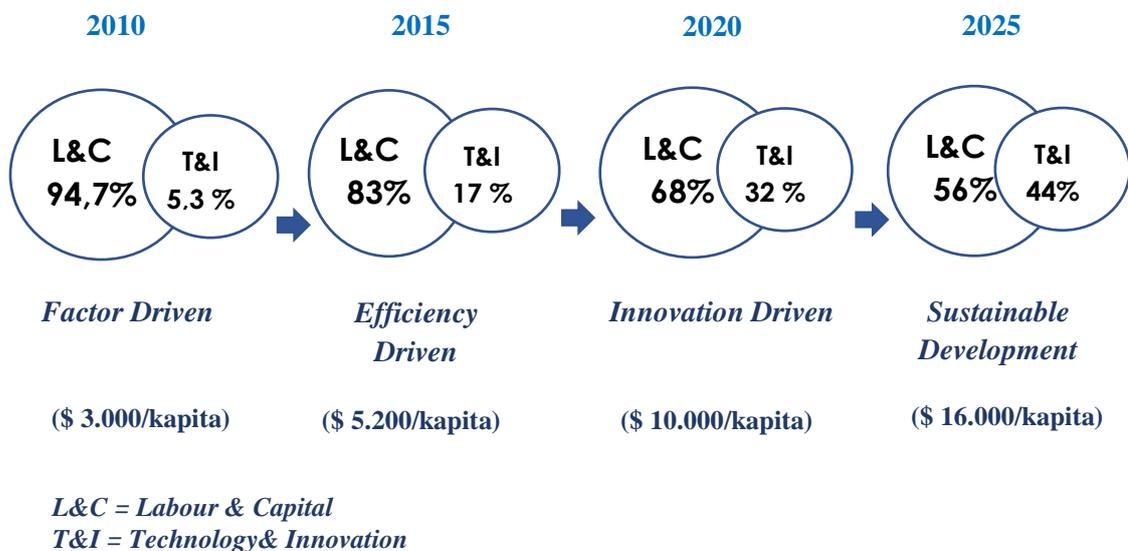
C.3 Inovasi sebagai Upaya Bela Negara

Jika bela negara selama ini hanya dijalankan dengan konten dan metode yang pragmatis dan lekat dengan nilai-nilai militeristik, justru inkonsisten dan tidak relevan dengan kondisi faktual saat ini yang telah tersaji medan perang gaya baru (*asymetric warfare*) yang semakin menjauh dari sisi militeristik. Kewaspadaan terhadap gangguan kepentingan nasional justru harus diantisipasi dengan cara dan sudut pandang baru. Disinilah inovasi hadir sebagai pembuka gerbang gendang perang ditabuh untuk membela negara, karena fakta – fakta yang telah diuraikan sebelumnya harus dihadapi dengan cara-cara konkrit dan multigatra.

Komite Inovasi Nasional (2012: 28), pernah merilis *Roadmap* Pertumbuhan Berbasis Inovasi, dalam rangka menuju *advanced-economy* pada 2025. Pertumbuhan melalui skema ini bertumpu pada inovasi yang berjalan seiring

dengan membenahan Sistem Inovasi Nasional (SINAS). Upaya membenahan SINAS ini bukan saja ditujukan untuk pada akhirnya mencapai PDB tinggi (3,760 triliun dolar AS hingga 4,470 triliun dolar AS) pada 2025, meski itu menjadi target paling utama, tetapi juga sekaligus untuk membenahi sejumlah indikator penting lain seperti *Total Factor Production* (TFP), Indeks Pembangunan Manusia (HDI), indikator *knowledge-based Economy* (KBE), paten, Hak atas Kekayaan Intelektual, guna menciptakan pertumbuhan berkesinambungan dan Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Roadmap Pertumbuhan Berbasis Inovasi, sebagai berikut:



Gambar 1. *Roadmap* Pertumbuhan Berbasis Inovasi

Roadmap tersebut mencanangkan bahwa, pada 2010, *input* inovasi (teknologi) barulah 5,3 %, sisanya (94,7 %) masih didominasi faktor konvensional *labour* dan *Capital*. Berangsur-angsur *input* inovasi (teknologi) akan ditingkatkan menjadi 17 % (tahun 2015), menuju 32% (tahun 2020) dan akhirnya ke angka 44% pada tahun 2025, guna mencapai *Advanced Economy*.

Dalam ekosistem digital dan *Internet of Things Era* saat ini, bermunculan ribuan *start up* baik bidang bisnis maupun sosial, skala lokal, nasional maupun internasional. Ide kemunculannya rata-rata didominasi oleh orisinilitas ide seorang



individu, yang pakar di bidang masing-masing, sisanya bisa beragam konsorsium. Bagaimana dengan konteks organisasi kecil ataupun besar bernama Negara Indonesia, yang muaranya untuk kepentingan nasional ? Seperti halnya tuntutan pertumbuhan pada level individu, entitas negara-pun selalu bergerak ke arah perbaikan dan pertumbuhan (Utomo, 2016:31). Gerak perbaikan melalui inovasi-pun bukan sekedar tutur akademik dan kerumitan proses, juga bukan pekerjaan sepele. Pun, demikian dengan bela negara yang terkesan berat dengan dogma perlakuan fisik.

Bagi aparatur atau birokrat, cara mencintai dalam sudut pandang membela negara bisa dimanifestasikan dalam bentuk inovasi terhadap kemajuan instansi tempat berkarya. Sifatnya boleh inkremental dan hal-hal kecil, seperti inovasi penataan ruang, pelayanan, pengelolaan kegiatan dan sebagainya. Saat ini telah hadir ribuan inovasi yang berasal dari berbagai *event* , mulai Diklat Pim III dan IV pola baru dan Lomba Inovasi Administrasi Negara bagi Alumni Diklat Pim I dan II (Inagara) dari Lembaga Administrasi Negara, *event* tahunan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Innovation Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri, hingga Kontes Inovasi Solusi dari UKP4.

Bersumber pada ribuan inovasi diatas, sangat jarang terdengar inovasi sebagai manifestasi bela negara. Sisi lain, indikator nyata dari aksi bela negara adalah patuh dan tuntas atas amanat peraturan perundang-undangan, yang telah ditetapkan oleh negara. Contoh, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 secara khusus diamanatkan substansi tentang Inovasi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yakni Bab XXI, khususnya bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itulah, upaya berinovasi sesuai amanat tersebut merupakan salah satu manifestasi nyata aksi bela negara.

C.4 Cendekiawan Sebagai Agen Birokrasi

Eksistensi komunitas intelektual memerlukan sebuah wadah, dalam hal ini birokrasi. Birokrasi merupakan pelaksana tugas pemerintahan suatu negara dengan melaksanakan fungsi administratif (mengelola, melayani) dan manajemen



(mengendalikan, untuk mencapai hasil) (Setiyono, 2016:41). Birokrasi merekrut sumber daya manusia sebagai pelaksana tugas berdasarkan intelektualitas (*intelligence*), pendidikan (*education*) dan kemampuan personal (*personal skill*), maka diperoleh tenaga-tenaga intelektual dengan bekal ilmu dan pengetahuan, yang kemudian melekat pada struktur dan fungsi birokrasi untuk turut melaksanakan tugas di lingkungan masing-masing, seperti akademisi pada perguruan tinggi negeri; peneliti, analis dan praktisi kebijakan serta widyaiswara pada instansi pemerintah.

Oleh karena pengetahuan dan sistem pengetahuan itu menentukan sejarah dan tahap sejarah (Gouldner, dalam Dhakidae, 2003:41). Maka jika Bela Negara sebagai sebuah kebijakan tidak disertai rumusan pengetahuan dan tatanan teknokratik yang lemah, selanjutnya tidak akan mampu menjadi sebuah tonggak sejarah peradaban baru untuk melekatkan jiwa kesadaran berbangsa pada seluruh target sasaran secara berkelanjutan.

Tak heran, munculnya kebijakan Bela Negara oleh banyak pihak dipersepsikan sebagai kebijakan yang tidak perlu, ragu-ragu dan tidak *One Government*. Dengan demikian, para intelektual birokrat wajib mencermati dinamika tersebut dari berbagai perspektif. Ragam perspektif tersebut diperlukan karena Kementerian Pertahanan sebagai instansi pemrakarsa nampak tidak siap, baik dalam hal infrastruktur, konsep, hingga kurikulum pembelajaran, karena sejak akhir tahun 2015 diluncurkan, hingga awal tahun 2018, belum terlaksana secara melembaga. Betapa tidak, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara pun sebagai tuan rumah penyelenggara teknis pendidikan Bela Negara baru berdiri pada akhir tahun 2016. Kejujuran intelektual wajib dijunjung tinggi dari para cendekiawan tersebut, karena tidak hanya sekedar menjadi perspektif, namun juga harus diwujudkan dalam bentuk kebaruan ide dan gagasan.

C.5 Pendidikan Bela Negara Sebagai Aset Penumbuhan Inovasi

Dalam mengakselerasi strategi agar Bela Negara bukan hanya menjadi sebuah kebijakan dengan konsepsi dasar di atas awan dan mampu diterapkan secara komprehensif, menarik dan inovatif, maka dari luasnya sudut pandang untuk



mengakomodir ide atau gagasan baru yang dapat ditempuh, Sudut pandang Partisipasi Murni dan Implementasi Kebijakan dianggap mampu menjadi fokus untuk mewakili peran para intelektual dalam memprovokasi aparatur sekaligus instansi sektor publik untuk berinovasi, dalam koridor dan konteks pendidikan bela negara.

1. Partisipasi Murni

Partisipasi diyakini memberi pengaruh positif terhadap kinerja atau pencapaian hasil dan kepuasan. Artinya, semakin menggunakan suara yang berkepentingan atau yang paling memahami persoalan, maka semakin meningkat kinerja atau pencapaian hasil serta kepuasan.

Partisipasi diperlukan oleh pemerintah karena pemerintah berkesempatan untuk meyakinkan masyarakat, membangun *trust*, mengurangi kegelisahan, membangun aliansi strategis dan mendapatkan legitimasi (*gain legitimacy*) (Keban, 2008:83). Namun yang (dianggap) umum terjadi di Indonesia adalah bahwa praktik partisipasi manipulatif. Masyarakat sangat rentan terdampak virus ini. Terlebih pemerintah dalam upayanya merilis sebuah kebijakan pragmatis yang dipaksakan, yang lazimnya terkandung kegiatan-kegiatan manipulatif. Menarik ditinjau kedalamannya, bentuk partisipasi murni dalam ragam kegiatan yang relevan dalam proses penumbuhan inovasi.

Bagaimana dengan kebijakan Pendidikan Bela Negara? Apakah tujuan dan sasaran Pendidikan Bela Negara telah tercapai? Apakah kebijakan tersebut juga sudah mengandung substansi kebaruan khas inovasi ? Setelah ditelisik lebih lanjut, terungkap informasi bahwa saat ini Kementerian Pertahanan kekurangan Sumber Daya Manusia dalam merancang dan mengembangkan secara teknokratis kurikulum Bela Negara yang substantif dan mendasar hingga mampu diperoleh kemanfaatannya oleh Calon Kader sasaran, menemui kendala. Jika hanya mengandalkan SDM internal, format dan struktur kurikulum yang muncul akan bernuansa militeristik. Untuk itu, untuk memperkaya struktur kurikulum Pendidikan Bela Negara, Kementerian Pertahanan melibatkan tenaga intelektual akademisi dari Universitas Indonesia dan UPN Veteran Jakarta.



Langkah demikian dinilai tepat. Sebab, dalam rancangan kurikulum yang telah sampai ke ruang publik hanya membidik sasaran pada siswa sekolah dan mahasiswa. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran akan mampu menjadikan Pendidikan Bela Negara ini menjadi sebuah sarana belajar yang menarik, serta menciptakan sebuah *creative hub* (pusat kreativitas) untuk mengelola pemahaman kebangsaan yang utuh.

Untuk sementara, pengembangan Pendidikan Bela Negara sementara menginduk pada Desk PPKP (Pengendali Pusat Kantor Pertahanan). Atas inisiatif para akademisi, ide awal untuk memulai Pendidikan Bela Negara terwujud melalui Program Parade Cinta Tanah Air, berupa Seminar dan Lomba Karya Ilmiah di bidang Nasionalisme dan Bela Negara yang diselenggarakan di sebagian besar daerah di Indonesia.

Berdasarkan dinamika diatas, diharapkan jangan ada lagi niat dan tindak para pemikir untuk memberikan pengetahuan Bela Negara dengan sudut pandang kuno dan lampau, melainkan dengan cara-cara kreatif, *breakthrough* dan inovatif. Dengan berpartisipasi murni, berarti turut mengubah cara pandang yang intelektual terhadap dirinya sendiri, mampu atau tidak merespon dinamika pengaruh global untuk menghasilkan karya terbaik yang bermanfaat bagi terbukanya cara pandang masyarakat terhadap upaya peperangan asimetris yang berpotensi menggerus keutuhan bangsa dan negara.

2. Implementasi Kebijakan

Gaung Pendidikan Bela Negara telah ditabuh sejak akhir 2015, melalui media massa kebijakan yang pada waktu itu baru dirintis dilakukan semacam uji publik (*water test*). Berjalan hingga saat ini, program Pendidikan Bela Negara tak kunjung pula dilaksanakan secara menyeluruh. Akibat maju mundurnya kebijakan ini, maka dalam melihat efektivitas implementasi kebijakan (Nugroho, 2014:686), maka ditinjau:

a. Ketepatan Kebijakan

Menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai dengan karakter kebijakannya.



Epistemologi dari kebijakan Pendidikan Bela Negara ini berniat membangkitkan semangat kebangsaan bagi warganya, namun tidak disertai itikad penyusunan kebijakan yang terstruktur.

a. Ketepatan Pelaksana

Aktor implementasi tidak hanya pemerintah. Ada kerjasama antar pemerintah, dan juga masyarakat/swasta.

Dalam upayanya mensukseskan Pendidikan Bela Negara, selain merangkul akademisi, Kementerian Pertahanan juga telah berkomunikasi dengan Kemenristekdikti, Kemendikbud dan Kementerian Pembangunan Manusia untuk melakukan kerjasama strategis terkait model pembelajaran aktif Pendidikan Bela Negara

b. Ketepatan Target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Program Pendidikan Bela Negara dari Kementerian Pertahanan ketika dilakukan “uji publik” mendapat benturan dari beberapa universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan bela negara secara mandiri dilingkungannya masing-masing, yang ternyata struktur pembelajarannya lebih taktis dan tepat sasaran. Hal ini juga menjadi evaluasi perbaikan kebijakan dimaksud.

c. Ketepatan Lingkungan

Ada 2 (dua) lingkungan yang paling menentukan. Pertama, yakni lingkungan kebijakan, artinya interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain. Kementerian Pertahanan telah melibatkan akademisi (secara lembaga) dari beberapa universitas ternama di Jakarta untuk membantu merumuskan struktur kurikulum pembelajaran, dan berkomunikasi dengan Kemenristekdikti untuk kepentingan penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara dimaksud.

Kedua, lingkungan eksternal kebijakan, yakni persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Hal ini berkenaan dengan interpretasi dari



lembaga strategis dalam masyarakat, media massa dan kelompok kepentingan lainnya. Sebagai contoh faktual, bahwa opini resmi antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI (lingkup tugas bidang pertahanan) berbeda. Maka hal ini akan turut mempengaruhi persepsi publik, khususnya tentang kejelasan dan kelanjutan kebijakan dan program Pendidikan Bela Negara.

d. Ketepatan Proses

Implementasi kebijakan terdiri dari 3 (tiga) proses, yakni:

i. *Policy Acceptance*

Publik memahami aturan main yang diperlukan untuk masa depan, sisi lain pemerintah memahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan

ii. *Policy Adoption*

Publik menerima sebagai sebuah aturan main untuk masa depan, dan pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan

iii. *Strategic Readiness*

Publik siap melaksanakan, birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan
Ketiganya sulit diterjemahkan akibat tidak adanya rumusan yang jelas dari institusi penyelenggara akan kepentingan masyarakat untuk turut serta dalam mensukseskan gagasan Bela Negara, maka publik pun kesulitan menerima apalagi melaksanakan aturan main tentang Bela Negara. Jika ada konsepsi yang terang, terstruktur dan jelas, pasti ada keterbukaan pikiran dan mental dari publik untuk menerima hal ini sebagai sebuah niat baik dari pemerintah. Disisi lain, terburu-buru dan ragu-ragunya instansi pemrakarsa juga mengabaikan peran teknokrat/ intelektual. Sebab Bela Negara era kini harus melingkupi segala bidang, dimana akan membutuhkan rumusan yang komprehensif dan matang.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai bagian dari sekelompok besar cendekiawan, layaknya kita membuka diri terhadap arus informasi yang merusak ilmu dan pengetahuan otentik menjadi sebuah logika terbalik. Sama dengan perspektif sebagian masyarakat terhadap politik. Politik sering dianggap menyesatkan, berisi niat buruk dan



memelihara kebiasaan destruktif bagi negara. Hal itu berlaku jika sudut pandang demikian tidak mempelajari kedalaman politik sebagai ilmu pengetahuan. Politik sebagai ilmu justru menjadi *guiding* yang jelas yang menuntun sebuah negara mampu berdiri secara mandiri, tangguh dan berdaulat. Akibat runtutan kebijakannya mampu mensejahterakan rakyat yang hidup didalamnya. Jika terjadi sebuah destruksi dalam tatanan negara, dapat dipastikan hal tersebut merupakan ulah atau perilaku manusia politik yang tidak paham nilai-nilai politik yang membangun.

Relevan dengan ilustrasi di atas, agar tidak timbul multi tafsir dan persepsi terhadap penyelenggaraan ragam aksi Bela Negara yang sedang dibangun, hendaknya tidak sekedar berargumen tanpa informasi dan data yang benar. Menjaga semangat untuk menyelenggarakan aksi Bela Negara wajib hukumnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa sebagai sebuah kebijakan unggul nasional, pelaksanaannya harus sesuai rel hingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Inisiatif berlebihan dalam menyelenggarakan aksi Bela Negara tanpa berbekal konsep dan struktur kurikulum yang matang dan tepat hanya akan menimbulkan peristiwa memperlakukan institusi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap aksi Bela Negara.

Harus diakui, hingar bingar Pendidikan Bela Negara rintisan Kementerian Pertahanan yang ada saat ini masih bersifat uji publik, untuk merangkul reaksi masyarakat dan *stakeholder* untuk kepentingan perbaikan kualitas kebijakan dan penyelenggaraan aksi Bela Negara ke depan. Campur tangan para intelektual mutlak dibutuhkan tidak hanya demi menguatkan dan menjadikan kebijakan yang unggul. Lebih dari itu, mereka dapat menjadi corong semangat untuk turut menyuarakan dan menggiatkan kembali kesadaran berbangsa baik dari unsur pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat melalui aksi Bela Negara yang lebih kekinian.

Pada akhirnya, daya intelektualitas cendekiawan birokrat dibutuhkan oleh instansi pemerintah untuk mengkreasi rumusan inovasi yang komprehensif dan mempengaruhi baik lingkungan strategis birokrasi secara struktur maupun fungsi, maupun masyarakat sebagai komponen penting Negara. Inovasi dengan berbagai



dampak positifnya, akan didedikasikan untuk tujuan yang lebih besar seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, efektivitas pemerintahan, pelayanan publik yang lebih bermutu dan kemakmuran bagi seluruh elemen bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Joesoef, Daud. 2014. Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Kaelan. 2000. Reformasi, Kebebasan Ideologi dan Kemungkinan Bangkitnya Masyarakat Nasakom Baru: Masa Depan Bangsa dan Kontroversi Pencabutan TAP No. XXV/MPRS/1966
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Lubis, Ahmad. H, DKK. 2012. Prospek Inovasi Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Indonesia
- Neuman, W. Lawrence. 1997. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (3rded.). Boston, Allyn and Bacon
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.
- Setiyono, Budi. 2016. Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Bandung: Penerbit Nuansa
- Suseno, Alex. 1994. Satya Negara: Mengakarkan Watak dan Kepribadian Bangsa Pejuang. Jakarta: PT. Gramedia
- Utomo, Tri Widodo W. 2016. Inovasi Harga Mati: Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Forum Manajemen Prasetya Mulya. 2014. Jakarta: PMBS Publishing
- Kompas.20 Desember 2017. Transaksi Dalam Jaringan Marak untuk Bisnis Narkoba dan Terorisme
- Kompas.com. Menhan Resmikan Pelaksanaan Tugas Desk PPKP. Di akses 8 November 2018. <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/00562795/Menhan.Resmikan.Pelaksanaan.Tugas.Desk.PPKP>
- Kemhan.go.id. Menhan meresmikan pelaksanaan tugas PPKP dan secara simbolis menyerahkan tiga kebutuhan bagi pamtas. Di akses 8 November 2018. <https://www.kemhan.go.id/2012/07/19/menhan-meresmikan-pelaksanaan-tugas-ppkp-dan-secara-simbolis-menyerahkan-tiga-kebutuhan-bagi-pamtas.html>